

Pembaruan Agraria Pilar Utama Kedaulatan Pangan



Witoro
Koordinator Koalisi Rakyat
untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)

Pernyataan Mochammad Tauchid lebih setengah abad lalu masih relevan hingga saat ini bahwa: *“soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Untuk mempertahankan hidup, orang berjuang buat mendapatkan makanan”*.¹ Sejak berabad-abad lalu, manusia mengembangkan berbagai cara untuk memperoleh makanan, baik mengambil dari alam maupun membudidayakannya. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan pangannya sendiri

agar makanan selalu tersedia sehingga kehidupan keluarga dan masyarakatnya terus berkembang.

Namun, upaya masyarakat untuk memproduksi dan memenuhi sendiri pangannya semakin terganggu oleh hadirnya pihak-pihak lain yang memanfaatkan tanah-tanah mereka. Sejarah mencatat kehadiran Belanda ke Indonesia, khususnya Jawa, untuk memperoleh produk pertanian yang dapat dijual di pasaran dunia. Tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan untuk meningkatkan usaha padi dan tanaman pangan lainnya untuk rakyat desa, kemudian digunakan untuk meningkatkan produksi tebu, nila, kopi, tembakau, dan lainnya. Proses inilah yang menyebabkan merosotnya kesejahteraan penduduk pribumi, yakni meluasnya kemiskinan dan kelaparan.

Proses komersialisasi pertanian jaman penjajahan Belanda itu terus berlanjut. Sejak dua-tiga dasa warsa terakhir proses yang dinamakan liberalisasi perdagangan pertanian dan pangan ini semakin menguat. Laporan International Forum on Globalization² mengungkapkan bahwa industri pertanian seperti usaha tani skala besar atau perusahaan trans nasional

¹ Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai masalah Pernghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia; Penerbit Tjakrawala, 1952

² International Forum on Globalization (IFG), *Making Room For Alternatives*, www.ifg.org

(TNC) dengan sistem pertanian monokultur yang berorientasi ekspor menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah petani tuna kisma serta kemiskinan dan kelaparan di dunia saat ini. Model industri pertanian ini tidak hanya meminggirkan, bahkan telah meruntuhkan usaha tani

skala kecil yang beraneka ragam, mandiri, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Globalisasi pangan yang digerakkan dan dikuasai korporasi menjadi penyebab struktural atas meningkatnya kelaparan dan kemiskinan dunia.

Perusahaan-perusahaan *trans-nasio-*

Kotak 1. Rantai Produk Pertanian dan Makanan Olahan

Rantai produk pertanian-pangan	Plasma nutfah, bibit, dan input pertanian dalam bentuk kimia	Perdagangan bahan mentah untuk produk makanan dan produk berserat	Pabrik pengolahan lanjutan	Supermarket
TNC yang berperan	Monsanto DuPont Bayer	ADM Louis Dreyfus BungeCargill	Nestlé, Kraft, Foods, Unilever, PepsiCo	Wal Mart, Carrefour, Metro, Tesco
Aktivitas utama	Produksi bibit dan bahan-bahan kimia sebagai input pertanian	Berdagang dan proses awal dari bahan-bahan mentah	Pengolahan bahan makanan dan minuman	Penjualan ritel produk makanan
Isu pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan atas hak kepemilikan intelektual. • Promosi teknologi yang tidak tepat kepada petani miskin. • Menghilangkan praktek pertanian alternatif yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kekuatan pasar untuk menekan harga. • Praktek pembelian yang tidak adil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kekuatan pasar untuk menekan harga. • Mengatur terciptanya standar yang ketat. • Praktek pembelian yang tidak adil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kekuatan pasar untuk menekan harga. • Mengatur terciptanya standar yang ketat. • Praktik pembelian yang tidak adil.
Dampak terhadap petani	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan hak untuk menyimpan dan mempertukarkan bibit-bibit. • Meningkatnya biaya input pertanian. • Penggunaan pestisida berbahaya. • Lingkaran hutang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang lebih rendah. • Terdorong ke pasar yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. • Biaya produksi dan resiko dialihkan ke produsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang lebih rendah. • Tersisih dari pasar • Biaya produksi dan resiko dialihkan ke produsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang lebih rendah. • Tersisih dari pasar • Biaya produksi dan resiko dialihkan ke produsen.

Sumber : Actionaid International, 2005

nal (TNC) seperti Monsanto, Cargill, dan Nestlé selama ini mendominasi rantai komoditi pangan dan produk-produk pertanian, mulai dari penyediaan benih dan pestisida hingga pengolahan produk pertanian yang terpanjang di supermarket. Dua dekade liberalisasi perdagangan telah memungkinkan perusahaan-perusahaan

Kotak 2. Konsentrasi Bisnis Korporasi Pertanian-Pangan Nasional dan Dunia

'Bagi siapa yang mau membeli jagung, sesungguhnya tidak banyak pilihan selain datang kepada kami.'
(Bob Kohlmeyer, mantan manager Perusahaan Cargill)

- 1) Bibit dan bahan-bahan kimia untuk kebutuhan pertanian
 - Enam TNC – BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto dan Syngenta – saat ini menguasai 75-80% pangsa pasar pestisida, turun dari 12 perusahaan pada tahun 1994.
 - DuPont dan Monsanto bersama-sama mendominasi pasar bibit dunia untuk jagung (65%), dan kedelai (44%).
 - Monsanto menguasai 91% pangsa pasar dunia untuk benih hasil modifikasi genetik/GM (*genetically modified*) di tahun 2001 dan mengambil alih 60% pangsa pasar benih jagung non-GM Brasil dalam kurun waktu dua tahun (1997-1999).
- 2) Perdagangan komoditas dalam jumlah besar
 - Dua TNC Amerika, Chiquita dan Dole Foods, menguasai hampir 50% perdagangan pisang dunia.
 - Archer Daniels Midland (ADM), Barry Callebaut dan Cargill mendominasi industri proses pengolahan coklat di Côte d'Ivoire, di mana 95% dari kapasitas pengolahannya dikuasai TNC.
 - Fyffes, distributor buah-buahan segar terbesar di Eropa, adalah satu-satunya perusahaan eksportir dari Belize dan Suriname.
 - Tiga perusahaan – ADM, Cargill dan Zen Noh – menguasai lebih dari 80% volume ekspor jagung Amerika.
- 3) Pabrik pengolahan makanan
 - Sepuluh besar perusahaan pengolah makanan menguasai 37% total penjualan dari 100 perusahaan terbesar di bidang industri.
 - Tiga perusahaan menguasai 85% pangsa pasar teh dunia, dan Unilever merupakan pemasok teh terbesar.
 - Nestlé memonopoli image pasar susu UHT di Pakistan, dan mengontrol sekitar 80% produksi susu Peru.
 - Empat perusahaan termasuk Cargill dan Tyson, menguasai 81% industri pengemasan daging sapi AS.
- 4) Penjualan ritel makanan
 - Tiga puluh korporasi ritel terbesar menguasai sekitar sepertiga dari seluruh penjualan barang-barang grosir untuk seluruh dunia, di mana sepuluh korporasi terbesarnya menghasilkan nilai penjualan sebesar US\$649 milyar di tahun 2002.
 - Wal-Mart menguasai 40% sektor ritel Meksiko.
 - Tiga puluh enam persen dari semua penjualan makanan di Thailand saat ini terhubung dengan ritel TNC, di mana Tesco memiliki 48 outlet dan mendapat keuntungan penjualan sekitar US\$1.2 milyar di tahun 2003.

Sumber: Actionaid International, 2005

transnasional itu mengembangkan produksi pangan secara massal, memperkuat posisi tawar dan pengaruh di negara-negara berkembang. Kontrol perusahaan transnasional terhadap kebijakan dan produksi pangan nasional dan internasional semakin menguat dan melemahkan negara dalam memenuhi hak rakyat atas pangan. Saat ini, mereka bisa dengan leluasa berhubungan langsung dengan petani-petani kecil. Gelombang merger, akuisisi dan aliansi bisnis dalam sektor industri pangan telah menghasilkan konsentrasi kekuatan pasar di antara para pelaku korporasi.³

Manguatnya dominasi perusahaan transnasional pertanian-pangan pada perkembangannya meminggirkan usaha tani yang selama ini menjadi gantungan hidup jutaan keluarga petani untuk menghasilkan pangan dan memperoleh pendapatan. Tidak mengherankan jika jumlah penduduk miskin dan kelaparan di seluruh dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Laporan FAO tahun 2004 misalnya, memperkirakan adanya 845 juta penduduk dunia yang kekurangan pangan selama tahun 2000-2003. Sebagian besar penduduk kelaparan itu tinggal di negara-negara sedang berkembang, yakni 815 juta orang. Sekitar 75 persen dari mereka yang lapar adalah penduduk pedesaan. Laporan FAO tahun 2005 bahkan mengungkap fakta tragis tentang

kelaparan dan kurang gizi yang membunuh hampir 6 juta anak-anak setiap tahunnya. Angka itu setara dengan jumlah anak pra sekolah di sebuah negara besar seperti Jepang. Sementara sekitar 530.000 perempuan meninggal saat hamil dan setelah melahirkan.

Situasi itulah yang mendorong ratusan orang perwakilan organisasi petani, nelayan, masyarakat adat, penduduk hutan, kaum perempuan, pemuda, konsumen, dan pergerakan kota dari 80 negara berkumpul di desa Nyéléni, Mali, pada bulan Februari 2007. Mereka mendiskusikan kondisi kehidupan mereka yang semakin memburuk. Salah seorang peserta forum itu menyatakan: "*Ketika tanah, sumber daya air, lingkungan hidup, dan alam secara keseluruhan dikuasai kelompok konglomerat, di sana kaum urban, petani kecil, nelayan, dan penduduk asli makin terpinggirkan. Tahap demi tahap mereka semakin tak berdaya oleh kekuasaan ekonomi baru yang merajalela dengan kekuatan finansial yang luar biasa.*"⁴

Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup setiap orang yang harus dipenuhi dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu. Pangan sebagai hak asasi manusia telah diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa seperti tercantum dalam Deklarasi Hak

³ Actionaid International, *Power Hungry: Six Reasons To Regulate Global Food Corporation*, 2005

⁴ "Forum Kedaulatan Pangan Sedunia Sepakat Membangun Kesadaran Petani", *Kompas*, Selasa, 27 Februari 2007

Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ECOSOC/CESCR). Perundangan nasional juga mengakui pangan sebagai hak asasi seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 27 dan Pasal 34. Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1996 tentang Pangan, dengan jelas menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan hak atas pangan rakyat, berkembang konsep ketahanan pangan. Pertemuan puncak pangan tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai, "Ketahanan pangan pada tingkat individu, rumah tangga, nasional, regional dan global (akan tercapai) jika semua orang, sepanjang waktu, memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan makanan yang disukai untuk kehidupan yang aktif dan sehat." Konsep ketahanan pangan inilah yang selama ini digunakan baik oleh hampir semua lembaga internasional maupun pemerintah di dunia. Indonesia juga menggunakan konsep ini seperti tertuang dalam UU Pangan tahun 1996 yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai: "*kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, merata dan*

terjangkau".

Kenyataan menunjukkan bahwa konsep dan program ketahanan pangan yang selama ini digunakan tidak mampu membebaskan ratusan juta penduduk dunia dari lingkaran kemiskinan dan kelaparan, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Kegagalan itu disebabkan karena konsep itu tidak mempersoalkan ketidakadilan pangan yang menjadi penyebab utama kemiskinan dan kelaparan. Ketahanan pangan tidak mepedulikan dari mana pangan berasal, apakah diproduksi sendiri atau diimpor. Pendekatan ini juga menganggap pangan sebagai barang dagangan dan pangan bisa dipenuhi melalui liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas. Meskipun produksi pangan dunia terus meningkat dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh umat manusia di bumi, namun kelaparan juga terus meningkat. Oleh karenanya, pendekatan ini tidak akan pernah mampu mengatasi kelaparan.

Menanggapi persoalan kelaparan yang masih terus dihadapi ratusan juta penduduk dunia dan gagalnya pendekatan ketahanan pangan yang berbasis liberalisasi perdagangan, organisasi petani internasional Via Campesina menawarkan pendekatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan konsep tandingan terhadap kebijakan pangan neoliberal yang digunakan oleh sebagian besar negara di dunia. Menurut Via Campesina, kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan negara untuk merumuskan sendiri kebijakan pertanian dan pangan-

nya, tanpa adanya dumping ke negara-negara dunia ketiga.

Kedaulatan pangan dapat diwujudkan antara lain dengan tujuh perjuangan. *Pertama*, memprioritaskan produksi pangan untuk pasar lokal dan dalam negeri serta berbasis pada sistem produksi yang beranekaragam dan agro-ekologis yang dikembangkan petani kecil dan keluarga petani. *Kedua*, menjamin harga yang adil untuk para petani kecil, yang berarti kekuasaan untuk melindungi pasar internal dari impor pangan murah dan dumping. *Ketiga*, meningkatkan akses rakyat terhadap tanah, air, hutan, daerah tangkapan ikan, dan sumber produksi lainnya melalui redistribusi yang sejati. *Keempat*, pengakuan dan penghargaan terhadap peran perempuan dalam produksi pangan serta akses dan kontrol yang adil terhadap sumber daya produktif. *Kelima*, meningkatkan kontrol komunitas terhadap sumberdaya produktif sebagai lawan dari pemilikan tanah, air, sumberdaya genetik dan sumberdaya lain oleh perusahaan. *Keenam*, perlindungan terhadap benih sebagai landasan pangan dan kehidupan, kebebasan untuk saling mempertukarkan dan menggunakan benih di antara para petani. Hal ini berarti menolak paten terhadap makhluk hidup dan perlunya moratorium terhadap tanaman transgenik. *Ketujuh*, investasi publik untuk mendukung kegiatan produktif keluarga dan komunitas serta

pemberdayaan komunitas lokal untuk mengontrol produksi dan pasar pangan untuk rakyat.⁵

Pembaruan Agraria

Tanah merupakan alat produksi utama bagi para petani untuk menghasilkan pangan. Oleh karenanya, akses terhadap tanah yang cukup merupakan elemen kunci terpenuhinya hak atas pangan. Tiadanya atau kecilnya akses terhadap tanah menyebabkan rakyat tidak dapat memproduksi pangan sendiri atau tidak bisa memperoleh pendapatan sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, kedaulatan pangan yang merupakan visi juga platform perjuangan meyakini bahwa akses dan kontrol terhadap tanah dan sumberdaya agraria lainnya merupakan prasyarat terwujudnya hak atas pangan.

Kedaulatan pangan akan terwujud jika ada pembaruan agraria yang radikal dan komprehensif sesuai dengan karakter wilayah dan masyarakat sebagai prasyarat pemenuhan hak rakyat atas pangan. Pembaruan agraria dilakukan untuk menata ulang struktur penguasaan tanah yang timpang sehingga menjadi lebih adil bagi rakyat miskin. Dengan adanya keadilan penguasaan sumber agraria ini perubahan sosial menuju transisi agraria akan terjadi. Pembaruan agraria dengan demikian akan menjadi landasan bagi terwujudnya kedaulatan pangan suatu

⁵ *Food Sovereignty: A Right for All, Political Statement of the NGO/CSO Forum for Food Sovereignty*, 2001

Tabel . Model Dominan Vs Model Kedaulatan Pangan⁶

Persoalan	Model Dominan	Kedaulatan Pangan
Perdagangan	Perdagangan bebas adalah segalanya (satu-satunya jalan menuju kesejahteraan)	Pangan dan pertanian bebas dari kesepakatan perdagangan
Tujuan utama produksi	Budidaya tanaman perdagangan untuk ekspor	Budidaya aneka tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri dan pasar lokal
Harga	Diserahkan mekanisme pasar	Harga yang adil yang menutup biaya produksi, pendapatan buruh dan petani kecil secara bermartabat.
Akses pasar	Pasar luar negeri	Akses ke pasar lokal dan menghentikan invasi pasar agribisnis
Subsidi	Dilarang (namun AS dan UE memberikan subsidi yang besar kepada petani kaya)	Boleh selama tidak merusak pasar negeri lain. Justru diperlukan untuk petani kecil dan untuk mendukung pertanian berkelanjutan
Pangan	Komoditas yang penting dan menguntungkan	Hak asasi manusia. Aman, bergizi, terjangkau, dalam jumlah yang cukup sesuai budaya lokal dan diproduksi lokal
Cara memproduksi	Satu pilihan efisiensi ekonomi	Hak penduduk pedesaan
Kelaparan	Karena rendahnya produksi pangan	Masalah akses dan distribusi, karena kemiskinan dan ketidakadilan
Ketahanan pangan	Dicapai dari mana pun (impor) dengan harga murah	Diproduksi sendiri oleh komunitas lokal
Kontrol terhadap sumber produksi	Diprivatisasi	Lokal dan dikontrol oleh komunitas
Akses terhadap tanah	Melalui pasar	Rerforma agraria sejati, tanpa RA perjuangan tidak banyak berarti
Benih	Komoditas yang dipatenkan	Warisan yang menjadi milik bersama
Kredit & investasi pedesaan	Dari bank swasta atau perusahaan	Dari pemerintah yang dirancang untuk mendukung petani kecil
Dumping	Tidak begitu masalah	Harus dilarang
Monopoli	Tidak masalah	Sumber persoalan, harus dihilangkan
Over produksi	Bukan hal penting	Menyebabkan harga jatuh dan memiskinkan petani kecil
GMO/Transgenik	Harapan masa depan	Merusak ekologi dan kesehatan, tidak diperlukan

⁶ Diadaptasi dari Peter Rosset, *Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements, Background*,

masyarakat atau negara yang diperjuangkan.

Pembaruan agraria harus memuat fungsi sosial-lingkungan atas tanah, laut, dan sumber-sumber daya alam, dalam konteks kedaulatan pangan. Pembaruan agraria ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi petani, masyarakat adat, nelayan, dan kaum miskin baik laki-laki maupun perempuan terhadap sumberdaya produktif terutama tanah, air, dan hutan serta alat-alat produksi pertanian, modal, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Pembaruan agraria untuk menata ulang struktur agraria yang timpang harus dimulai dari *land reform* untuk meningkatkan akses petani dan kaum miskin lainnya terhadap tanah secara adil.

Redistribusi tanah dan kebijakan pertanian berkelanjutan serta perdagangan yang adil bagi keluarga petani, kelompok petani serta koperasi akan memungkinkan terjadinya pengurangan jumlah penduduk yang lapar dan miskin. Selain itu juga akan meningkatkan perkembangan ekonomi di pedesaan dan nasional, konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan sumberdaya produktif lainnya. Pertanian berkelanjutan yang berbasis pengetahuan lokal dikembangkan untuk meningkatkan produktifitas lahan dan lebih ramah lingkungan. Lebih dari itu, sistem pertanian ini akan

meningkatkan martabat para keluarga di pedesaan, serta memberikan aneka hasil pangan lokal yang lebih sehat dan terjangkau bagi konsumen di pedesaan dan perkotaan.

Peran Organisasi Rakyat

Dalam penutupan Forum Kedaulatan Pangan Sedunia di Mali, para peserta menyampaikan Deklarasi Nyeleni:

*"Kami berkomitmen untuk membangun gerakan kolektif untuk kedaulatan pangan dengan menempa aliansi, saling mendukung perjuangan dan memperluas solidaritas, memperkuat dan mengembangkan kreatifitas rakyat di seluruh dunia yang berkomitmen terhadap kedaulatan pangan. Kami akan membangun gerakan kedaulatan pangan melalui penguatan organisasi, koperasi, asosiasi dan jejaring, dan membangun aliansi strategis di antara konstituen yang beragam seperti konsumen, pelajar, akademisi, praktisi kesehatan, kelompok agama, dan sebagainya. Kami akan meningkatkan hubungan yang konstruktif antara masyarakat desa dan kota, produsen dan konsumen, petani kecil, nelayan, penggembala dan masyarakat adat. Kami akan melaksanakan aksi ini di wilayah lokal dan daerah masing-masing, dalam gerakan kami sendiri maupun dan bekerjasama dalam solidaritas dengan gerakan rakyat lainnya."*⁷

Peran pemerintah dalam membuat peraturan dan program sangat menentukan terlaksananya pembaruan agraria. Namun *land reform* berdasar inisiatif pemerintah (*land reform by grace*) tidak menjamin terwujudnya pembaruan agraria

dan kedaulatan rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria. *Land reform by grace* yang didasarkan kedermawanan dan kebaikan hati pemerintah sangat potensial untuk diselewengkan dan dimanipulasi seperti yang terjadi selama ini. Apalagi, kekuatan rezim ekonomi global yang semakin kuat dan terkonsolidasi, terus menerus melakukan intervensi melalui berbagai cara terhadap pemerintah untuk menjalankan agenda reforma agraria yang berbasis pasar.

Agar pembaruan agraria dapat berjalan dengan baik, maka harus bersandarkan atas inisiatif bersama antara rakyat dengan pemerintah. Pelaksanaan pembaruan agraria mensyaratkan kemauan dan kemampuan rakyat sesuai dinamika lapangan di pedesaan. Organisasi tani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pembaruan agraria atas inisiatif rakyat (*agrarian reform by-leverage*). Organisasi rakyat adalah pilar utama dari perjuangan reforma agraria di Indonesia

Pembaruan agraria harus digerakkan oleh organisasi rakyat karena rakyat lah yang paling berkepentingan secara langsung atas pelaksanaan reforma agraria dan penegakkan keadilan agraria. Oleh karenanya hanya dengan organisasi rakyat yang kuat, gerakan-gerakan pembaruan agraria akan berjalan menuju terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta mampu menangkal kepentingan kelompok bisnis dan rezim ekonomi internasional.

Organisasi rakyat yang kuat dengan visi pembaruan agrariannya sendiri, yang

akan menjadi kekuatan penentang terhadap upaya-upaya rezim ini mencapai tujuan-tujuan pembaruan yang mereka rancang. Penguatan organisasi rakyat merupakan prioritas utama dalam perjuangan pembaruan agraria di Indonesia. Pembaruan agraria yang didasarkan pada kekuatan rakyat atau *land reform by leverage* merupakan jawaban terhadap ketidakadilan agraria yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional yang selama ini memarjinalkan dan mencerabut hak-hak rakyat atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya.

Dukungan Modal, Teknik Produksi dan Pasar

Land reform dengan redistribusi tanahnya hanya akan menjadi program yang sia-sia jika dukungan infrastruktur dan kelembagaan pertanian tidak tersedia. *Land reform* harus diikuti dengan sejumlah program pendukung yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program. Karena itu, program redistribusi tanah harus diikuti dengan dukungan modal produksi di tahap awal, perbaikan distribusi barang-barang yang diperlukan sebagai input pertanian, perbaikan sistem pemasaran dan perdagangan hasil-hasil pertanian, penyuluhan-penyuluhan pertanian yang diperlukan untuk membantu para petani memecahkan masalah-masalah teknis yang dihadapinya, dan program lainnya yang dapat menunjang keberhasilan para petani penerima tanah dalam memproduksi. Departemen teknis

seperti Departemen Pertanian harus lebih giat melakukan kompetensinya yaitu membantu petani untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan guna meningkatkan produktifitas lahan sekaligus menjamin keberlanjutan agro-ekologi lahan hasil redistribusi.

Pembaruan agraria memberi pilihan leluasa kepada komunitas lokal guna membuat kebijakannya sendiri dalam mengelola produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangan. Sistem pangan lokal merupakan alternatif atau bentuk perlawanan terhadap menguatnya sistem perdagangan bebas yang tidak adil. Penguatan sistem pangan lokal merupakan upaya untuk mewujudkan hak pangan dan mengatasi kelaparan. Sistem ini diharapkan mampu membuat masyarakat lebih tahan atau lentur terhadap gempuran globalisasi. Pemenuhan pangan dengan memproduksi secara lokal akan menurunkan bahkan menghilangkan pemborosan biaya transpor dan pencemaran yang diakibatkan pengiriman pangan dari negara-negara lain yang jaraknya ratusan ribuan kilometer.

Sistem cadangan dan perdagangan pangan lokal dapat terwujud jika produksi aneka pangan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga. Sisanya disimpan di lumbung keluarga atau komunitas sebagai cadangan pangan untuk mengantisipasi paceklik. Perdagangan dilakukan saat kebutuhan pangan hingga musim berikut telah terjamin. Perdagangan lokal menjadi prioritas dengan memperpendek jarak dan meningkatkan hubungan antara produsen

dan konsumen. Hubungan yang lebih langsung antara petani produsen dengan konsumen memungkinkan petani memperoleh harga yang adil dan layak. Sementara konsumen akan memperoleh produk pangan lebih sehat dan segar.

Kebijakan pedesaan dan pertanian dalam kedaulatan pangan bukanlah model pertanian berbasis perdagangan bebas yang berorientasi ekspor seperti yang selama ini dilakukan. Hanya dengan mengubah model industri pertanian yang bias perusahaan skala besar menjadi berfokus pada skala pertanian rumah tangga dan komunitas, kita dapat menghentikan lingkaran kemiskinan, upah rendah, urbanisasi, dan kerusakan lingkungan. Kebijakan pedesaan dalam kedaulatan pangan berbasis pada strategi agroekologi yang dipusatkan pada petani kecil dan pertanian keluarga serta nelayan tradisional. Produksi pertanian diprioritaskan untuk kebutuhan petani sendiri, serta pasar lokal dan nasional terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Pembaruan Sistem Pangan Masyarakat

Sistem pangan global yang didominasi oleh TNC merupakan sistem yang bias kepentingan ekonomi perusahaan raksasa dengan tujuan mengeruk keuntungan dan bukan ditujukan untuk memenuhi hak asasi manusia atas pangan. Forum Kedaulatan Pangan Sedunia di Mali 2007 juga sepakat membangun kesadaran petani kecil, nelayan, dan buruh di seluruh dunia untuk bangkit melawan sistem yang selama ini membelenggu mereka. Hanya dengan kekuatan dari mereka, maka perjuangan

kedaulatan pangan dapat dibangun. Sebagai hak asasi paling dasar, maka pangan harus berada dalam kendali rakyat agar pemenuhannya dapat terjamin dan berkelanjutan. Oleh karenanya, diperlukan sistem pangan alternatif yang berbasis hak asasi manusia dan karakteristik sumberdaya lokal yang khas. Satu alternatif yang berkembang adalah sistem pangan lokal yang berbasis keluarga petani kecil. Sistem pangan lokal atau komunitas merupakan perlawanan terhadap sistem pangan global yang dimotori oleh TNC.

Mengembalikan pangan sebagai hak rakyat dapat dilakukan dengan melokalisasi pangan. Lokalisasi pangan berarti:

*"Mengupayakan sebisa mungkin agar semua kebutuhan pangan diproduksi sendiri pada tingkat lokal, daerah, dan nasional. Dengan mengutamakan produksi dan distribusi aneka pangan lokal, daerah dan nasional, kita dapat berswasembada pangan, memberikan kesempatan pasar kita berkembang sehingga dapat melindungi usaha para petani kecil dari kemungkinan krisis, kita bebaskan usaha tani dari kepentingan yang berorientasi ekspor perdagangan, memangkas biaya transportasi dan lingkungan yang tidak perlu, dan kita dapat mengembangkan perekonomian pedesaan yang berkelanjutan."*⁸

Sistem pangan komunitas adalah sistem pengelolaan alat produksi, cara produksi, distribusi dan konsumsi yang ada dan atau berkembang dalam suatu wilayah

yang relatif kecil seperti kampung, desa, dan masyarakat adat hingga beberapa desa, kecamatan, kabupaten atau suatu bio-region. Konsep sistem pangan komunitas sering ditukargunakan dengan sistem pangan "lokal" atau "regional", tetapi tetap mencantumkan kata "komunitas" atau masyarakat untuk menekankan adanya hubungan yang kuat antar komponen dalam sistem pangan. Sementara pembaruan sistem pangan masyarakat merupakan upaya kerjasama antar warga suatu komunitas dalam upaya menata ulang sumber produksi, cara produksi - pengolahan, distribusi, dan konsumsi pangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dalam rangka mengatasi kelaparan, meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Pembaruan sistem pangan komunitas ini tentu tidak akan terjadi dengan sendirinya dan tidak mudah dilakukan. Diperlukan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan yang merupakan hak asasi manusia. Masyarakat juga perlu sadar tentang kondisi kelaparan serta akar masalah yang menjadi penyebabnya. Kesadaran ini akan menjadi awal kebangkitan solidaritas dan kerjasama seluruh komponen masyarakat untuk melakukan pembaruan sistem pangan mereka. Berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, petani, konsumen, kelompok perempuan, lembaga pemerintah, Badan

⁸ Alistair Mcconnachie, "Localisation And Food Sovereignty," <http://www.sovereignty.org.uk/features/articles/root2.html>

Perwakilan Desa dan wakil lembaga lainnya tergabung dalam suatu koalisi dan secara aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembaruan sistem pangan komunitas mereka. Pembaruan sistem pangan komunitas juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari orang-orang yang berdedikasi.

Pembaruan ini merupakan mimpi yang perwujudannya ada di tangan kita. Agar mimpi itu dapat terwujud maka warga desa harus bergotong-royong memproduksi sendiri aneka pangan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan berbagai sumber produksi yang ada di wilayah mereka. Hasil produksi bahan pangan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga desa dan sisanya disimpan sebagai cadangan pangan untuk mengantisipasi terjadinya paceklik. Hasil panen bahan pangan utama dilakukan hanya jika kebutuhan pangan seluruh warganya hingga musim berikutnya telah terjamin. Perdagangan lokal menjadi prioritas dengan memperpendek jarak antara produsen dan konsumen untuk menghemat biaya dan energi.

Ada berbagai langkah pembaruan sistem pangan komunitas yang dapat dilakukan dan biasanya disesuaikan situasi masing-masing masyarakat yang khas. Contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain : (i) menentukan lokasi atau komunitas yang akan menjadi rintisan; (ii) membentuk kelompok kerja yang diberi wewenang untuk melakukannya; (iii) melakukan kajian situasi

pangan komunitas secara partisipatif untuk memetakan masalah dan potensi sumber-sumber produksi, produksi, distribusi (perdagangan dan cadangan), dan konsumsi pangan; (iv) melakukan perencanaan jangka panjang, menengah atau pendek di mana semua anggota komunitas berhak untuk mengambil keputusan bersama tentang tanaman pangan apa yang akan dibudidayakan, tempat membudidayakannya, oleh siapa dan kepada siapa pangan yang akan dihasilkan itu akan didistribusikan; (v) menggalang sumberdaya yang cukup dan struktur organisasi yang memadai untuk memulai dan melanjutkan rencana kerja yang telah dibuat; (vi) melaksanakan rencana dengan meningkatkan kerjasama dan partisipasi berbagai organisasi formal maupun informal, asosiasi dan individu dengan berbagai latar belakang dan keahlian; (vi) mendokumentasikan dan mengevaluasi proses dan hasil gerakan untuk mengetahui capaian sasaran yang telah direncanakan; (vii) merayakan keberhasilan yang telah dicapai dengan acara dan publikasi menarik untuk menarik perhatian konsumen dan petani produsen agar bergabung; (ix) mengadopsi berbagai strategi dari luar yang sesuai untuk mendorong para petani dan konsumen untuk bergabung dalam gerakan pembaruan sistem pangan lokal dan regional melalui koperasi, pasar tani, atau *Community Shared Agriculture*. ❖ •